



i-WIN LIBRARY

**INTERNATIONAL
WAQAF ILMU NUSANTARA
LIBRARY**

*waqafilmunusantara.com
admin@waqafilmunusantara.com*

i-WIN Library

Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara

Office: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS)

Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia 11800

E-mail: secretariat.alamnusantara@gmail.com

admin@waqafilmunusantara.com

Visit us at: <https://www.waqafilmunusantara.com>

Title : Obskurantisme Patriarki dalam Politik Perempuan: Sebuah Esai Partisipasi Perempuan dalam Politik Indonesia

Author(s) : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.Hum

Institution : Salaja Pustaka Institute

Category : Opinion

Topics : Gender, Politics, Society

Obskurantisme Patriarki dalam Politik Perempuan: Sebuah Esai Partisipasi Perempuan dalam Politik Indonesia

Oleh: Muhammad Syarif Hidayatullah

(Penulis buku sehimpun puisi "Secarik Rindu untuk Tuhan",

Direktur Eksekutif Salaja Pustaka Institute)

Menurut World Bank (2019) dalam laporannya menyebut Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini disebabkan begitu banyak indikator masih kurangnya keterlibatan perempuan di pemilu. Sebelum itu, absennya program pendidikan politik. Di tengah pandemi yang masih mewabah hingga sekarang ini, dalam laporannya World Bank menyebutkan tiap hari di seluruh dunia sebanyak 810 perempuan meninggal dunia saat dalam keadaan hamil atau saat melahirkan sebab berbagai komplikasi yang dialaminya. Selama pandemi ini pula semakin banyak ketimpangan yang dialami perempuan terutama bagi imigran, disabilitas, dan masyarakat pribumi perempuan, terutama di sektor pendidikan, hukum, dan kesehatan serta politik.

Keadaan ini sudah begitu berat bahkan sebelum pandemi berlangsung. Perempuan harus menghadapi perjuangan berat untuk menemukan keadilan di ruang publik. Walaupun telah banyak reformasi aturan birokrasi, perempuan dalam bidang hukum secara global hanya memperoleh tiga seperempat hak di depan hukum dibanding laki-laki, dengan ketimpangan yang begitu buruk yang terjadi di lingkungan keluarga, pekerjaan, penguasaan aset ekonomi, dan bentuk kekerasan lainnya.

Selama pandemi ini pula perempuan rentan untuk bisa menghasilkan pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya. Secara sosial juga mendapatkan banyak kesulitan untuk mengurus pekerjaan domestik seperti mengurus keluarga yaitu suami, anak-anak, dan anggota keluarga lain. Mewabahnya pandemi menjadi tantangan bagi semua orang, khususnya perempuan.

Dalam negara yang menjunjung demokrasi dalam segala penentuan dan pembuatan kebijakan untuk keadilan, kebaikan, kebahagiaan bersama maka Indonesia sudah seharusnya tidak menunda-nunda lagi untuk melibatkan secara penuh perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan saat ini hanya 30 persen saja di parlemen, faktanya bahkan di bawah angka itu. Padahal politik sebagai jalan untuk memikirkan dan mendengarkan aspirasi dari semua gender, harus mengikutsertakan secara penuh keterlibatan perempuan dalam penentuan kebijakan publik yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Kita ingin kebijakan dan keterlibatan perempuan adalah akomodatif dan substansial demi kemajuan dan keadilan yang sama di depan konstitusi.

Konstitusi kita mewajibkan untuk terlibat aktif dalam mengisi reformasi dan memenuhi kewajiban UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi, sehingga aturan dan kebijakan apapun yang dihasilkan oleh lembaga dan alat pemerintahan mesti patuh di bawah payung UUD 1945 yang

sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. Keterlibatan perempuan dalam politik masih begitu sangat memprihatinkan, perempuan menemui kesulitan dan ketimpangan haknya untuk masuk di politik atau parlemen dan atau menjadi penentu kebijakan di berbagai lembaga publik maupun domestik.

Padahal pemerintah harus mendengar dan melibatkan dari semua warga negaranya, dan memberikan hak yang sama bahkan membuat strategi atau peraturan yang betul-betul serius mengakomodasi perempuan untuk juga diberikan tempat di panggung publik dan penentu kebijakan pemerintahan.

Masalah yang dihadapi oleh bangsa ini adalah kita tidak percaya kepada perempuan. Perempuan hanya di rumah saja, memasak, mencuci, dan melayani segala hal kebutuhan keluarga dibandingkan untuk diberi panggung yang lebih besar yaitu aspirasinya untuk juga bisa terlibat di politik.

Negara yang menganut patriarki, yaitu laki-laki lebih mendominasi perempuan dan perempuan dalam kaca mata laki-laki selalu dianggap makhluk nomor dua, seperti dalam pembagian kerja, sebab laki-laki yang selalu mengambil keputusan dalam berbagai bidang hidup. Di satu sisi, dalam budaya patriarki perempuan merasa kurang percaya diri dalam mengambil kursi di politik. Bahwa mereka dianggap lemah, kaum yang tidak bisa sama sekali mandiri dan selalu bergantung. Dalam politik anggapan-anggapan demikian terlihat jelas terjadi dalam praktik dan terbukti betapa kurangnya keikutsertaan perempuan dalam parlemen. Bahkan dikatakan keterlibatan perempuan di politik telah terlambat, perempuan lebih cocok berada di area dapur dan sumur sehingga banyak perempuan yang tidak terlibat politik dan memutuskan mengikuti kekuatan anggapan bias gender tersebut. Masyarakat kita begitu terbelakang untuk mau jernih melihat hal ini. Sebab kita sebagai masyarakat parlemen dan non parlemen menganggap bahwa perempuan yang hanya bisa di rumah itu kemudian terus-menerus kita sendiri langgengkan di ranah keluarga, tempat kerja, bahkan sering pula terselip dalam candaan di antara perempuan dan laki-laki; ini praktik bias gender.

Hingga sekarang, terbukti hanya satu saja presiden perempuan yang memegang tampuk elit pemerintahan. Padahal bisa dilihat, sisanya adalah laki-laki dan dalam praktiknya belum ada komitmen yang menegaskan kata-kata untuk menjadi perbuatan, dan bentuk realisasi dari peraturan ketat untuk mencapai keadilan gender di muka politik dan pemerintahan. Sebab banyak juga dari kita yang sadar bahkan tanpa sadar mendukung budaya patriarki dengan mengatakan perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki; yaitu perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan karena kuatnya anggapan bahwa laki-laki lebih mampu, lebih dominan, dan dianggap lebih kuat untuk berada di tampuk politik dan pemerintahan. Padahal secara umum, tidak ada laki-laki yang bisa menjadi tumbuh, besar, dan menjadi kuat jiwa dan raganya kecuali berkat dilahirkan oleh perempuan, oleh jasa ibunya. Maka akan begitu kurang ajar, laki-laki yang menyepelkan peran perempuan di kehidupan ini. Dan betapa

sebetulnya dia secara sadar dan di lubuk hatinya yang paling dalam mengakui kesetaraan dan potensi kemampuan yang sama antara dia dan perempuan.

Sudah bukan lagi saatnya bagi kita untuk serakah mengambil kesempatan politik, seharusnya sudah saatnya untuk betul-betul legowo bersaing secara sehat bersama perempuan bahkan mendampingi perempuan untuk sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama di politik.

Perempuan dan Partisipasi Politik

Partisipasi perempuan berarti keterlibatan perempuan dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan bagi mereka, bukan hanya dirasakan secara dominan oleh laki-laki. Sebut saja, seperti terlibat secara aktif memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk partai politik tertentu, atau terlibat di struktur organisasi non pemerintahan lainnya, atau bentuk keikutsertaan perempuan bahkan seperti menandatangani petisi, menolak membayar pajak, mengikuti demonstrasi damai, mengikuti protes tertentu dalam ruang publik dan partisipasi politik yang konstitutif lainnya.

Untuk mewujudkan demokrasi yang ramah gender, sudah seharusnya perempuan diberikan haknya bukan sekadar membuat reformasi aturan yang berbelit-belit namun sebagian besar hanya baru menjadi rancangan, draft, atau tertulis saja di kebijakan-kebijakan dan program kerja lembaga dan instansi pemerintahan dan publik lainnya. Ketamakan kuasa tidak akan melahirkan keadilan, kebaikan, menghasilkan kebijakan yang setara untuk seluruh warga negara. Alih-alih ingin terus berkuasa sendirian, tanpa ingin memberikan kesempatan yang sama dengan perempuan, justru ketamakan dan langgengnya budaya patriarki hanya akan menghasilkan terus-menerus ketidakadilan produk hukum yang bias, mencederai dan mengkhianati konstitusi dan seluruh tumpah darah tanah air ini.

Partai politik sebagai kendaraan politik untuk memberikan kesempatan yang setara kepada laki-laki dan perempuan diharuskan juga adil gender. Adil gender dalam partai politik bukan hanya hadir secara nyata di partai tertentu saja, melainkan sudah saatnya seluruh partai politik di Indonesia adil gender seperti; masuknya kader perempuan dalam kepengurusan partai, perempuan dalam rekrutmen proses politik yaitu ikutnya para perempuan dalam seleksi anggota atau kandidat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemudian indikator lain dari adil gender adalah, partisipasi kader perempuan dalam segala aktivitas partai.

Hambatan Perempuan dalam Politik

Perempuan dalam usahanya yang setengah mati agar bisa masuk dalam politik, setidaknya terdapat tiga hambatan. Hambatan-hambatan yang dimaksud sehingga menyebabkan banyak perempuan yang tidak sempat dan mampu masuk ke dalam partisipasi politik dan di parlemen. *Pertama*, hambatan psikologis yaitu hambatan perempuan yang termakan oleh

pengaruh budaya patriarki sehingga ia merasa kurang percaya diri, segan dan takut dalam proses juga aktivitas kegiatan dan pencalonan kandidat partai.

Kedua, hambatan sosial yaitu masih kuatnya anggapan masyarakat yang menganggap bahwa partai politik seharusnya hanya diisi oleh laki-laki. Di sisi lain, perempuan seharusnya hanya di rumah saja untuk mengurus semua keperluan rumah tangga walaupun banyak sekali perempuan yang cakap kepemimpinan dan cerdas dalam politik dalam rekam jejaknya juga terpengaruh kultur sosial patriarki yang membelenggu kesempatan perempuan untuk masuk ke politik. Dan hal ini terjadi di kebudayaan sosial secara luas di sebagian mayoritas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dan terakhir, yang *ketiga* adalah faktor ekonomi menjadi penghalang untuk perempuan menjadi calon pemimpin dan dapat bersaing di pemilu yang diusung partai politik, sebab dinilai biaya pemilu yang amat besar dan patriarki lebih dahulu begitu amat besar mempengaruhi keputusan partai dan masyarakat.

Sudah saatnya Perpres *Grand Design* Keterwakilan Perempuan Diterbitkan

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti Perpres No 65 tahun 2020 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Mei 2020 sebagai dasar agar menerbitkan Perpres Keterwakilan Perempuan sebagai pengganti undang-undang di tengah situasi darurat dan kepentingan pandemi, bersama ketimpangan gender yang terus terjadi di semua sektor kehidupan berbangsa dan sistem bernegara yang sekarang ini.

Kesejahteraan dan keadilan gender adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai sebagaimana sudah ada niat kuat dari pemerintah. Ini untuk terus mendorong keterlibatan perempuan untuk memenuhi kuota 30% di parlemen dan mengikis ketimpangan gender dalam politik. Diharapkan sangat, dengan akan hadirnya Perpres dan peraturan lain yang pro keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan sehingga dapat memberikan ruang pendidikan politik dan aktifnya perempuan di aktivitas partai politik dimana saja yang diminati. Sebab pemerintah yang kuat dan partai politik jika telah ingin betul-betul adil gender maka pasti akan menciptakan kehidupan berbangsa yang solid, kokoh, dan adil bagi semua orang. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi komitmen untuk menciptakan keadilan, kebaikan, kebahagiaan bersama seluruh generasi dan tanah air Indonesia. Indonesia adil gender.

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.Hum.

Lulusan : Bahasa dan Sastra Inggris, UIN Alauddin Makassar

Biodata Narasi : Penyair sehimpun opus puisi "Secarik Rindu untuk Tuhan" (2019), Esais, lulusan Summa Cumlaude di jurusan Bahasa & Sastra Inggris, UIN Alauddin Makassar. Penulis juga adalah Direktur Eksekutif @salajapustaka Institute

Media social : IG hidayattullah_muhammadsyarif, FB Muhammad Syarif Hidayatullah

No. HP/WA : 085242693606

E-mail : mshidayatullah96@gmail.com